

Research Article

Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District)

Rizki Ilham Juliansyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: rizkiilham0921@gmail.com

Luthfi Faisal Natsir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: luthfinatsir.lfn@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. This is an open access article under the CC BY License: (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : August 13, 2026

Revised : September 9, 2026

Accepted : October 8, 2026

Available online : October 30, 2026

How to Cite: Rizki Ilham Juliansyah, & Luthfi Faisal Natsir. (2026). Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District). Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(4), 333–342. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i4.113>

Abstract

This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the management of mangrove ecosystems in Karangsong Village, Indramayu Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors that influence its implementation. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and a literature review. Research informants included the Indramayu Regency Environmental Agency, the Karangsong Village Government, the Pantai Lestari Forest Farmers' Group (KTH), and the local community. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldana model, which encompasses data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the implementation of Collaborative Governance in mangrove ecosystem management has been quite successful. This is evidenced by mutual trust among stakeholders, community participation, intensive communication, and regulatory support, including Law No. 32 of 2009, Law No. 27 of 2007, as amended by Law No. 1 of 2014, and Karangsong Village Regulation No. 2 of 2009 on the Protection of Mangrove Areas. However, its implementation still faces resource and

Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District)

Rizki Ilham Juliansyah, Luthfi Faisal Natsir

budgetary constraints due to the division of authority under Law No. 23 of 2014 on Regional Government, as well as the lack of optimal involvement of academics and the media, resulting in collaboration that has not yet evolved into a penta-helix model. It is concluded that the implementation of Collaborative Governance in mangrove ecosystem management in Karangsong Village has been fairly effective, but it still needs to be strengthened through increased resource support, the expansion of collaborative networks, and the optimization of academic and media involvement so that mangrove management can proceed more sustainably.

Keywords: Collaborative Governance, Mangrove Ecosystem Management, Collaboration, Karangsong Village.

Collaborative Governance dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Wilayah Pesisir Melalui Ekosistem Mangrove di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Lestari, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan ekosistem mangrove telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya kepercayaan antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, komunikasi yang intensif, serta dukungan regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan Peraturan Desa Karangsong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran akibat pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta belum optimalnya keterlibatan akademisi dan media sehingga kolaborasi belum berkembang menuju model penta helix. Disimpulkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong telah berjalan cukup efektif, tetapi masih perlu diperkuat melalui peningkatan dukungan sumber daya, perluasan jejaring kolaborasi, dan optimalisasi keterlibatan akademisi serta media agar pengelolaan mangrove dapat berlangsung lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Kolaborasi, Desa Karangsong.

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberadaan mangrove berperan sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan intrusi air laut, habitat berbagai biota pesisir, penyerap karbon, serta sumber penghidupan bagi masyarakat melalui perikanan, hasil hutan, dan pengembangan ekowisata. Namun demikian, berbagai wilayah pesisir di Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa kerusakan ekosistem mangrove akibat alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi

memerlukan kolaborasi berbagai aktor agar tujuan konservasi dan pemanfaatan sumber daya dapat berjalan secara berkelanjutan.

Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kawasan yang berhasil melakukan rehabilitasi mangrove melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Lestari, masyarakat, dan sektor swasta. Meskipun demikian, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, pembagian kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program rehabilitasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan, koordinasi, dan komitmen antaraktor yang terlibat.

Konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan publik memerlukan proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam pengambilan keputusan secara bersama. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Pendekatan ini dinilai relevan untuk menganalisis pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong karena melibatkan berbagai aktor dengan peran, kepentingan, dan kewenangan yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi faktor penting dalam pengelolaan kawasan mangrove. Fatimah (2021) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berperan dalam menjaga keberlanjutan mangrove di Desa Karangsong, sedangkan Ramadhan (2022) menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* mampu meningkatkan efektivitas rehabilitasi mangrove melalui kerja sama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian Nurhayati (2020) lebih menyoroti pengaruh kerusakan mangrove terhadap kondisi lingkungan pesisir, sementara Kurniawan (2023) menekankan pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di sisi lain, Yulianti (2021) menjelaskan bahwa pengembangan ekowisata mangrove memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek partisipasi masyarakat, rehabilitasi mangrove, ekowisata, maupun pembangunan berkelanjutan secara terpisah. Belum banyak penelitian yang menganalisis secara komprehensif pelaksanaan *Collaborative Governance* berdasarkan model Ansell dan Gash (2008), sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian *Collaborative Governance* pada pengelolaan sumber daya pesisir, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi sehingga pengelolaan

ekosistem mangrove dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan pengelolaan wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses Collaborative Governance dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, fenomena, dan hubungan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan mangrove.

Penelitian dilaksanakan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Lestari, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan ekosistem mangrove dan Collaborative Governance.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kawasan mangrove dan aktivitas pengelolaannya. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait proses kolaborasi, peran para pemangku kepentingan, serta faktor pendukung dan penghambat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui arsip, foto, laporan, dan dokumen pendukung lainnya, sedangkan studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Lestari, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut bertujuan mendukung rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Analisis penelitian mengacu pada model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process*.

1. Dimensi *Starting Conditions*

Berdasarkan hasil penelitian, *starting conditions* dalam pengelolaan ekosistem

mangrove di Desa Karangsong menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dari aspek kepercayaan, hubungan antara pemerintah, KTH Pantai Lestari, masyarakat, dan sektor swasta telah terbangun melalui kerja sama yang berlangsung secara berkelanjutan. Kepercayaan tersebut terlihat dari keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pendampingan teknis, Pemerintah Desa dalam memfasilitasi kegiatan, serta KTH Pantai Lestari sebagai pelaksana rehabilitasi di lapangan. Kondisi ini memperkuat koordinasi dan mendukung keberlangsungan program rehabilitasi mangrove. Temuan tersebut sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan kondisi awal yang menentukan keberhasilan kolaborasi.

Dari aspek konflik, penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan konflik yang menghambat pelaksanaan kolaborasi. Perbedaan kepentingan yang muncul diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program. Namun, pada indikator sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan anggaran akibat pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menyebabkan rehabilitasi mangrove masih bergantung pada dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil ini sejalan dengan penelitian Ramadhan (2022) yang menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas *Collaborative Governance*.

2. Dimensi *Institutional Design*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *institutional design* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong telah didukung oleh aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kolaborasi. Pengelolaan mangrove mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Desa Karangsong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai pembagian peran, kewenangan, serta tanggung jawab setiap pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan mangrove dapat berjalan lebih terarah. Temuan ini sejalan dengan Ansell dan Gash (2008) yang menjelaskan bahwa desain kelembagaan yang jelas akan memperkuat efektivitas kolaborasi.

Dari aspek transparansi dan partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai kegiatan rehabilitasi, penanaman, maupun pengelolaan mangrove disampaikan melalui koordinasi antara Pemerintah Desa, Dinas Lingkungan Hidup, KTH Pantai Lestari, dan masyarakat. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi serta menyampaikan saran melalui musyawarah dan komunikasi dengan pengelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik, meskipun pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fatimah (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove dipengaruhi oleh adanya partisipasi masyarakat yang didukung oleh aturan dan koordinasi yang jelas.

3. Dimensi *Facilitative Leadership*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong berperan sebagai penggerak kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah Desa Karangsong dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pendampingan, sedangkan KTH Pantai Lestari berperan sebagai pelaksana utama rehabilitasi dan pemeliharaan mangrove. Pembagian peran tersebut menciptakan koordinasi yang baik sehingga setiap aktor dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Temuan ini sesuai dengan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa *facilitative leadership* diperlukan untuk membangun komitmen, mengarahkan kolaborasi, serta menjaga hubungan kerja sama antaraktor.

Selain menjalankan fungsi koordinasi, pemerintah juga memberikan fasilitasi berupa pendampingan teknis, pembinaan, serta menjembatani kerja sama dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rehabilitasi diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang menghambat kolaborasi. Meskipun demikian, kemampuan kepemimpinan dalam memperluas jejaring kolaborasi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya keterlibatan akademisi dan media dalam mendukung penelitian, inovasi, edukasi, dan publikasi pengelolaan mangrove. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun belum sepenuhnya berkembang menuju model *penta helix*, sehingga penguatan jejaring antarpemangku kepentingan masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

4. Dimensi *Collaborative Process*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative process* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong telah berjalan cukup baik. Proses kolaborasi diawali melalui dialog dan koordinasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, KTH Pantai Lestari, masyarakat, dan sektor swasta dalam membahas pelaksanaan rehabilitasi, perlindungan, serta pengelolaan kawasan mangrove. Dialog yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membangun kesamaan tujuan, memperkuat komunikasi, serta mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program. Temuan ini sesuai dengan Ansell dan Gash (2008) yang menyatakan bahwa dialog tatap muka menjadi dasar terbentuknya kolaborasi yang efektif.

Proses dialog yang berlangsung secara berkelanjutan turut membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan. Kepercayaan terlihat dari konsistensi setiap aktor dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sedangkan komitmen diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan mangrove. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah mampu mendukung keberhasilan pengelolaan mangrove di Desa Karangsong. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fatimah (2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove dipengaruhi oleh komunikasi, partisipasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, penguatan kolaborasi masih diperlukan, khususnya melalui perluasan keterlibatan akademisi dan media agar proses *Collaborative*

Governance berkembang menuju model *penta helix* yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Collaborative Governance*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong didukung oleh tingginya kepercayaan antar pemangku kepentingan serta adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi. Hubungan yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, KTH Pantai Lestari, masyarakat, dan sektor swasta mampu memperkuat koordinasi, komunikasi, serta pembagian peran dalam rehabilitasi dan perlindungan mangrove. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Peraturan Desa Karangsong Nomor 2 Tahun 2009 memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove. Temuan tersebut menunjukkan bahwa indikator kepercayaan pada dimensi *Starting Conditions* dan indikator aturan pada dimensi *Institutional Design* telah berjalan efektif sehingga mampu memperkuat keberhasilan kolaborasi.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Keterbatasan anggaran dipengaruhi oleh pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pengelolaan wilayah laut sampai 12 mil sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Indramayu lebih berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kerja sama. Selain itu, kolaborasi yang terbangun masih didominasi oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sedangkan keterlibatan akademisi dan media belum berlangsung secara berkelanjutan. Menurut analisis peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator sumber daya pada dimensi *Starting Conditions* dan indikator peran pemimpin pada dimensi *Facilitative Leadership* belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan jejaring kolaborasi menyebabkan pengelolaan ekosistem mangrove belum berkembang menuju model *penta helix* secara utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu telah berjalan cukup efektif. Keberhasilan kolaborasi didukung oleh adanya kepercayaan antar pemangku kepentingan, kejelasan regulasi, kepemimpinan yang memfasilitasi kerja sama, serta proses dialog, kepercayaan, dan komitmen yang terbangun secara berkelanjutan. Regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, serta Peraturan Desa Karangsong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove, menjadi landasan dalam pelaksanaan kolaborasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan pendanaan akibat pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir

Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District)

Rizki Ilham Juliansyah, Luthfi Faisal Natsir

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, keterlibatan akademisi dan media belum berlangsung secara optimal sehingga kolaborasi belum berkembang menuju model *penta helix*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan jejaring kolaborasi, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta perluasan peran akademisi dan media guna mendukung pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, Pemerintah Desa Karangsong, Kelompok Tani Hutan (KTH) Pantai Lestari, serta seluruh informan yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Bengen, D. G. (2001). Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. *Institut Pertanian Bogor. Bogor.*
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.
- Dye, T., & Dye, T. R. (2024). *Understanding public policy*. BoD–Books on Demand.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). Kybernology (ilmu pemerintahan baru).
- Nurhati, I. S., & Murdiyarso, D. (2023). *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove: Sebagai Rujukan Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon*. CIFOR.
- Ryaas, R. (2002). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. *Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.*
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sarundajang, S. H. (2002). Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. *Jakarta: Pustaka Sinar.*
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. *Cet. VII.*
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. *(No Title)*.
- Adhitiowasis, A., Maryani, E., & Andari, R. (2022). Pengelolaan Ekosistem Dan Daya Dukung Lingkungan Kawasan Wisata Bahari Mangrove Karongsong Indramayu. *Journal of Tourism and Creativity*, 6(2), 106-110.

Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District)

Rizki Ilham Juliansyah, Luthfi Faisal Natsir

- Alongi, D. M. (2012). *Carbon sequestration in mangrove forests. Carbon management, 3* (3): 313–322.
- Alongi, D. M., & Zimmer, M. Sustainable Development of Mangrove S kkkkk S Ecosystems: A Blue Carbon Perspective.
- Anderson, J. E. (1992). Public.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory, 18*(4), 543-571.
- Armitage, D. (2005). Adaptive capacity and community-based natural resource management. *Environmental management, 35*(6), 703-715.
- Armitage, D. (2005). Adaptive capacity and community-based natural resource management. *Environmental management, 35*(6), 703-715.
- Barbier, E. B., Hacker, S. D., Kennedy, C., Koch, E. W., Stier, A. C., & Silliman, B. R. (2011). The value of estuarine and coastal ecosystem services. *Ecological monographs, 81*(2), 169-193.
- Bengen, G. D. (2000). Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Biologi Laut. *Jakarta: Djambatan*.
- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., ... & Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global ecology and biogeography, 20*(1), 154-159.
- Gunawan, H. (2017). Fakta dan data mangrove Karangsong. *Media Brief, 5*, 1-2.
- Huda, N. (2008). *Strategi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Ikhsanudin, N., Kusmana, C., & Basuni, S. (2018). Analisis pemanfaatan hutan mangrove dan peran stakeholders di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Agrica, 11*(2), 47-58.
- Juliasnyah, R. I., Natsir, L. F., & Pangestu, M. A. (2024). Partisipasi Masyarakat Desa Pabean Udik Dalam Pemberdayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Pabean Udik. *aspirasi, 14*(1), 61-69.
- Karniawati, N. (2017). *HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)*. *CosmoGov, 1* (2), 205.
- Oni, O., Kusmana, C., & Basuni, S. (2019). Success story rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu.
- Purnamasari, R., Suprpto, D., & Purwanti, F. (2015). Pengembangan Ekowisata Mangrove Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 4*(4), 146-154.
- Purnamasari, R., Suprpto, D., & Purwanti, F. (2015). Pengembangan Ekowisata Mangrove Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES), 4*(4), 146-154.
- Suryana, A. A. H., & Pamungkas, W. (2018). Analisis Kepuasan Wisatawan Terhadap Kualitas Produk Jasa Wisata Mangrove Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. *Jurnal Perikanan Kelautan, 9*(2).
- Tjokroamidjojo, B. (1974). Pengantar administrasi pembangunan.

Collaborative Governance in Supporting Coastal Environmental Sustainability Through Mangrove Ecosystems in Indramayu Regency (A Case Study in Karangsong Village, Indramayu District)

Rizki Ilham Juliansyah, Luthfi Faisal Natsir

UNDANG UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Desa Karangsong Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove.